

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pemulihan/rehabilitasi NTT sebagai salah satu gudang ternak, dengan mengembangkan program diklat berkeahlian dan berwawasan agribisnis dalam rangka mendukung 4 (empat) target utama pembangunan kementerian pertanian. Melalui peranannya Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang handal di bidang peternakan baik aparatur maupun non aparatur.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yaitu: "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kemajuan sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian. Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern."

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja;
- 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kepelatihan;
- 3) Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- 4) Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan peternakan dan melaksanakan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK);
- 5) Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan di bidang ternak potong;
- 6) Memberikan pelayanan konsultasi agribisnis;
- 7) Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negeri dan melaksanakan kerjasama luar negeri;
- 8) Melaksanakan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan serta melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel;

- 9) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, penatausahaan dan rumah tangga institusi yang transparan dan akuntabel.

Dalam tataran praktisnya Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

- 1) Menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat pelaku utama usaha pertanian;
- 2) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam menyelenggarakan pelatihan;
- 3) Menumbuh-kembangkan jejaring kerjasama diklat dengan semua pihak yang berkepentingan;
- 4) Menjadi Balai sebagai Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) dan sebagai desiminotor teknologi pertanian bidang peternakan.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur berbasis web terintegrasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari 9 Modul pengguna sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Modul-modul tersebut terdiri dari; modul Admin, modul Penganggaran, modul Komitmen, modul Bendahara, modul Pembayaran, modul Persediaan, modul Piutang, modul General Ledger & Pelaporan (GLP), serta modul Aset Tetap.

Laporan Keuangan ini disusun menggunakan data yang diperoleh dari SAKTI menggunakan modul GLP. Data yang terhimpun di dalam modul GLP dan digunakan untuk proses penyusunan Laporan Keuangan merupakan integrasi dari modul penganggaran, bendahara, pembayaran, persediaan dan aset tetap.

## A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah sebagai berikut:

##### (1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp100 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp2500 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	283.720.000	386.542.027	102.822.027	136	217.050.000	276.603.362	59.553.362	127
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>283.720.000</b>	<b>386.542.027</b>	<b>102.822.027</b>	<b>136</b>	<b>217.050.000</b>	<b>276.603.362</b>	<b>59.553.362</b>	<b>127</b>
<b>Belanja Negara</b>								
1. Belanja Pegawai	4.067.275.000	4.054.817.655	(12.457.345)	100	3.693.779.000	3.660.507.685	- 33.271.315	99
2. Belanja Barang	8.947.887.000	8.095.318.472	(852.568.528)	90	4.863.847.000	4.805.260.034	- 58.586.966	99
3. Belanja Modal	214.996.000	214.996.000	0	100	88.623.000	88.623.000	-	100
<b>Jumlah Belanja Negara</b>	<b>13.230.158.000</b>	<b>12.365.132.127</b>	<b>(865.025.873)</b>	<b>93</b>	<b>8.646.249.000</b>	<b>8.554.390.719</b>	<b>-91.858.281</b>	<b>99</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan TA 2024 Semester II mencapai 168,17% dari target yang ditentukan pada awal tahun. Berikut rincian dan penjelasan PNBPN periode Semester 2 TA 2024:

Rincian Estimasi, Realisasi dan Perbandingan Pendapatan Periode Desember 2024

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK				
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan				
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	120.500.000,	139.918.000,	139.918.000,	116,11
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	33.720.000,	37.608.767,	37.608.767,	111,53
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	98.500.000,	144.335.000,	144.335.000,	146,53
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251</b>	<b>252.720.000,</b>	<b>321.861.767,</b>	<b>321.861.767,</b>	<b>127,36</b>
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi				
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0,	50.450.000,	50.450.000,	0
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	30.000.000,	0,	0,	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254</b>	<b>30.000.000,</b>	<b>50.450.000,</b>	<b>50.450.000,</b>	<b>168,17</b>
4256	Pendapatan Jasa Lainnya				
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	1.000.000,	0,	0,	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256</b>	<b>1.000.000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>

4259	Pendapatan Lain-Lain				
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	14.230.260,	14.230.260,	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0,	14.230.260,	14.230.260,	Infinity
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	283.720.000,	386.542.027,	386.542.027,	136,24
	JUMLAH PENDAPATAN	283.720.000,	386.542.027,	386.542.027,	136,24

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 Semester II adalah sebesar Rp.12.365.132.127 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.13.230.158.000 atau mencapai 93%. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	4.054.817.655	4.054.817.655	100
Belanja Barang	8.095.318.472	8.095.318.472	90
Belanja Modal	214.996.000	214.996.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>12.365.132.127</b>	<b>12.365.132.127</b>	<b>93</b>

Capaian Realisasi Belanja TA 2024 Semester II. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Mendapat instruksi penghematan anggaran dari melalui eselon I sebesar Rp.845.157.000 sesuai arahan Pemerintah sehingga berdampak pada realisasi belanja.

### Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Belanja Pegawai	4.054.817.655	3.660.507.685	10,8
Belanja Barang	8.095.318.472	4.805.260.034	68,5
Belanja Modal	214.996.000	88.623.000	142,6
<b>Total Belanja</b>	<b>12.365.132.127</b>	<b>8.554.390.719</b>	<b>44,5</b>

## B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.054.817.655 Rp.3.660.507.685. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri

Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada TA 2024, BBPP kupang mendapat mutasi masuk 4 pegawai PPPK yang menyebabkan naiknya anggaran belanja pegawai. Selain itu banyaknya kegiatan yang tetap dilaksanakan di luar hari dan jam kerja menyebabkan kenaikan belanja lembur dibanding tahun 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.740.805.790	3.618.893.814	3,4
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	213.124.751	-	-
Belanja Lembur	102.374.000	41.614.000	146
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.056.304.541</b>	<b>3.660.507.814</b>	10,8
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>1.486.886</b>	<b>- 129</b>	1.1152.724
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.054.817.655</b>	<b>3.660.507.685</b>	<b>10,8</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.8.095.318.472 dan Rp.4.805.260.034. Nilai realisasi belanja barang Semester II TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 68,5% dari Semester II TA 2023. Hal ini disebabkan oleh:

1. Peningkatan realisasi belanja barang secara umum disebabkan oleh meningkatnya volume kegiatan pelatihan dan pendampingan khususnya pada program PAT (Perluasan Areal Tanam)

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Belanja Barang Operasional	1.300.071.922	1.276.198.293	1,9
Belanja Barang Non Operasional	920.697.758	592.166.799	55,5
Belanja Barang Persediaan	101.200.600	80.582.946	25,6
Belanja Jasa	327.512.317	307.753.821	6,4
Belanja Pemeliharaan	1.285.484.539	1.105.434.508	16,3
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.000.351.336	1.323.123.667	202,3
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	160.000.000	120.000.000	33,3
<b>Jumlah</b>	<b>8.095.318.472</b>	<b>4.805.260.034</b>	<b>68,5</b>

## B.5. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp.214.996.000 sedangkan pada periode yang sama di TA 2023 sebesar Rp.88.623.000.

### Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.996.000	63.623.000	237,9
Belanja Modal Lainnya	-	25.000.000	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>214.996.000</b>	<b>88.632.000</b>	142,6
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>214.996.000</b>	<b>88.623.000</b>	<b>142,6</b>

Belanja modal peralatan dan mesin adalah berupa pembelian alat penunjang perkantoran (dirinci pada CaLBMN) dan belanja modal lainnya berupa biaya pengembangan website BBPP Kupang.

### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp.91.663.000. Turunnya realisasi belanja modal periode Semester II TA 2024 dibandingkan TA 2023 karena alokasi belanja modal yang sumbernya dari MPPNBP diarahkan pemanfaatannya untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.

### Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.996.000	63.623.000	237,9
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>214.996.000</b>	<b>63.623.000</b>	<b>237,9</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.97.110.500 dan Rp.34.830.706. Persediaan merupakan jenis

aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	24.160.500	28.868.706
Bahan untuk Pemeliharaan	0	5.962.000
Persediaan Lainnya	72.950.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>97.110.500</b>	<b>34.830.706</b>

Detail barang persediaan dijelaskan lebih rinci pada CaLBMN.

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan dengan periode 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp37,098,259,000.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.11.548.485.532 dan Rp.13.584.443.148. Terjadi penurunan sebesar 14% yang berasal dari proses reklasifikasi. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024</b>	<b>13.584.443.148</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	214.996.000
Transfer Masuk	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	2.250.953.616
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>11.548.485.532</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-10.639.733.574
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>908.751.958</b>

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.22.113.863.715 dan Rp.21,675,048,715. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024</b>	<b>21.928.863.715</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	185.000.000
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Reklasifikasi Keluar	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>22.113.863.715</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-5.931.562.674
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>16.182.301.041</b>

Reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap dijelaskan pada CaLBMN.

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp2,793,976,100.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2024 tidak berubah dari periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.000.000.

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.18.273.834.977. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13.584.443.148	-10.639.733.574	908.751.958
2.	Gedung dan Bangunan	21.928.863.715	-5.931.562.674	16.182.301.041
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	802.677.000	- 702.423.823	100.253.177
<b>Jumlah</b>		<b>36.315.983.863</b>	<b>-17.273.720.071</b>	<b>17.191.306.177</b>

#### C.4. ASET LAINNYA

##### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.25.000.000 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Dimana aset tersebut berupa website BBPP Kupang yang dikembangkan pada tahun 2024.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Website	25.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>25.000.000</b>

##### C.4.2 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.250.953.616.

##### C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-2.236.013.616 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	25.000.000	0	25.000.000
2.	Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>

**C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

**C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.21.245.010. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	21.245.010	32.432.099
<b>Jumlah</b>	<b>21.245.010</b>	<b>32.432.099</b>

1. Belanja Barang yang masih harus dibayar berupa:
  - a. Tagihan Listrik senilai Rp. 21.245.010

**C.6. EKUITAS**

**C.6. Ekuitas**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.55.421.554.860 dan Rp.56.242.533.280. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.269.243.362 dan Rp.295.164.559, Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Akun	Uraian	2024	2023	selisih (%)
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	139.918.000	99.145.000	41,1
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	37.608.767	32.399.559	16,1
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	144.335.000	94.950.000	52
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	50.450.000	45.000.000	12,1
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	24.000.000	0
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan	0	20.000	0
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	250.000	0
<b>JUMLAH</b>		<b>372.311.767</b>	<b>269.243.362</b>	<b>38,3</b>

1. Secara keseluruhan naiknya penerimaan PNBP dikarenakan kerjasama pelatihan maupun penyewaan sarana prasarana lebih sebanyak tahun sebelumnya.
2. Adanya peningkatan produksi hasil pertanian/peternakan.

## D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3,995,399,911 dan Rp.3,953,991,002, naik sebesar 1,05%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	2024	2023	selisih (%)
Beban Gaji Pokok PNS	2.563.027.700,	2.433.345.940	5,3
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-1.416,	129	997,7
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.372,	39.270	-9,9
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-665.400	-	
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	176.131.610	172.485.870	2,1
Beban Tunj. Anak PNS	54.319.600,	52.107.062	4,2
Beban Tunj. Struktural PNS	35.750.000,	28.350.000	26,1

Pengembalian Tunj Struktural PNS	-635.000	0	
Beban Tunj. Fungsional PNS	356.878.000,	331.912.000	7,5
Beban Tunj. PPh PNS	32.744.308,	13.718.572	138,7
Beban Tunj. Beras PNS	131.080.200,	137.960.100	-5,0
Beban Uang Makan PNS	334.674.000,	373.946.000	-10,5
Beban Tunjangan Umum PNS	56.165.000,	61.680.000	-8,9
Pengembalian Tunj Umum PNS	-185.070		
Beban Uang Lembur	92.862.000	41.614.000	123,2
Beban Gaji Pokok PPPK	153.772.800,		
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.095,		
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.532.960,		
Beban Tunjangan Anak PPPK	3.075.456,		
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	13.500.000,		
Beban Tunjangan Beras PPPK	9.559.440,		
Beban Uang Makan PPPK	21.682.000,		
Beban Uang Lembur PPPL	9.512.000,		
<b>JUMLAH</b>	<b>4.054.817.655</b>	<b>3.647.158.685,</b>	<b>11,2</b>

1. Naiknya beban pegawai BBPP Kupang pada tahun 2024 diakibatkan karena ada 4 Mutasi masuk pegawai PPPK pada bulan Maret 2024.

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.64.658.636 Rp.75.102.913. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	2023	2024	selisih (%)
Beban Persediaan konsumsi	105.213.806,	71.639.013	48,9
Beban persediaan lainnya	695.000,	3.463.900	-80,9
<b>JUMLAH</b>	<b>105.908.806,</b>	<b>75.102.913</b>	<b>41</b>

Detail dan rincian beban persediaan dapat dilihat pada CaLBMN.

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.174230.170 dan

Rp.2.183.763.814. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	2024	2023	selisih (%)
Beban Keperluan Perkantoran	1.131.279.492,	1.116.909.043	1,3
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	36.486.500,	26.925.490	35,5
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.385.710,	4.167.760	-18,8
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	118.928.000,	128.196.000	-7,2
Beban Bahan	749.995.163,	545.897.037	37,4
Pengembalian Beban Bahan	-	1.796.868	-100,0
Beban Honor Output Kegiatan	78.800.000,	14.600.000	439,7
Beban Barang Non Operasional Lainnya	83.903.595,	32.864.467	155,3
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7.999.000,	-	-
Beban Langganan Listrik	270.686.257,	250.478.816	8,1
Beban Langganan Telepon	12.881.191,	13.984.095	-7,9
Beban Sewa	21.900.000,	10.674.330	105,2
Beban Jasa Profesi	20.850.000,	31.330.000	-33,5
<b>JUMLAH</b>	<b>2.537.094.908</b>	<b>2.174.230.170</b>	<b>16,7</b>

1. Kenaikan paling signifikan terdapat pada komponen beban bahan, hal ini dikarenakan penambahan kegiatan pelatihan dan pendampingan program PAT.

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.098.219.508 dan Rp.1.242.278.633. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	2024	2023	selisih (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	754.813.143,	660.933.531	14,2
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	331.622.496,	305.043.181	8,7
Beban Pemeliharaan Jaringan	18.305.000,	9.082.500	101,5
Beban Pemeliharaan Lainnya	154.182.550,	107.808.996	43,0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	32.523.350,	15.351.300	111,9

<b>JUMLAH</b>	<b>1.291.446.539,</b>	<b>1.098.219.508</b>	<b>17,6</b>
---------------	-----------------------	----------------------	-------------

Secara umum beban pemeliharaan TA 2024 meningkat 17,6% dari tahun anggaran sebelumnya. n.

#### D.6. **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1,002,838,830 dan Rp.3,085,880,600. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	2024	2023	selisih (%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.381.414.891,	867.628.967	174,5
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	768.900.000,	-5.609.500	-13.807
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	656.274.145,	413.629.650	58,7
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	193.762.300,	47.474.550	308,1
<b>JUMLAH</b>	<b>4.000.351.336,</b>	<b>1.323.123.667</b>	<b>202,3</b>

Beban perjalanan dinas meningkat drastis dikarenakan volume kegiatan pelatihan yang jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya.

#### D.7. **Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp60,000,000 dan Rp149,990,909. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	160.000.000	120.000.000	33
<b>Jumlah</b>	<b>160.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>33</b>

Detail barang yang diserahkan dan daftar penerima barang dapat dilihat pada CaLBMN.

#### D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 732.019729,00 dan Rp720.376.804,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	2024	2023	selisih (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	388.424.415,	493.212.601	-21,2
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	732.194.350,	729.791.752	0,3
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	92.469.844,	92.469.844	0
Beban Penyusutan Irigasi	79.500.190,	79.500.190	0
Beban Penyusutan Jaringan	4,	4	0
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	1.852.500,	-	0
<b>JUMLAH</b>	<b>1.294.441.303,</b>	<b>1.394.974.391</b>	<b>-7,2</b>

Sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebanyak 7,2%. Penurunan terbesar ada pada transaksi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, hal ini dikarenakan aset yang sudah tidak digunakan sudah di reklasifikasi menjadi aset lainnya untuk selanjutnya dilakukan penghapusan.

#### D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	2024	2023	selisih (%)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6.250.000	0

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	14.230.260,	0	0
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.110.000	0
<b>JUMLAH</b>	<b>14.230.260</b>	<b>7.360.000</b>	<b>93</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.56.242.533.280 dan Rp.57.510.507.618.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.-13.057.518.520 dan Rp.-9.545.761.695. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.72.950.000 dan Rp0.

#### E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

#### E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.8.227.787.357 dan Rp.10.042.765.065. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024.

Uraian	2024	2023	selisih (%)
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.365.132.127	8.554.390.719	-7,78
Diterima dari Entitas Lain	-386.542.027	-276.603.362	-4,80
Transfer Masuk	185.000.000	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>12.163.590.100</b>	<b>8.277.787.357</b>	<b>-7,52</b>

#### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.55.421.554.860 dan Rp.56.242.533.280.